

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penyampaian laporan keuangan sudah sejak lama dilakukan oleh beberapa peneliti di berbagai negara. Dyer dan McHugh (1975) meneliti profil ketepatan waktu pelaporan dan normalitas keterlambatan dengan menggunakan 120 perusahaan di Australia periode 1965-1971. Mereka menguji variabel ukuran perusahaan, tanggal berakhirnya tahun buku dan profitabilitas. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan tanggal berakhirnya tahun buku berpengaruh dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan profitabilitas tidak signifikan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan.

Givoly dan Palmon (1982) melakukan penelitian mengenai *Timeliness of Annual Earnings Announcement: Some Empirical Evidence*. Givoly dan Palmon menguji ukuran perusahaan dan kompleksitas operasi yang terdiri dari pertumbuhan penjualan dan rasio persediaan terhadap total asset. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahun 1960 hingga 1974. Sampel yang digunakan berjumlah 210 perusahaan dari 25 jenis industri yang terdaftar di Bursa Efek New York. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penundaan pelaporan erat kaitannya dengan pola industri dan tradisi *bad news* cenderung menyebabkan keterlambatan pengumuman dan ukuran perusahaan menunjukkan hubungan yang negatif dengan ketepatanwaktuan (*timeliness*) pelaporan keuangan

tahunan. Penelitian ini juga menguji pengaruh karakteristik perusahaan dengan ketepatanwaktuan (*timeliness*), hasilnya adalah ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan keterlambatan pelaporan dan kompleksitas operasi secara langsung berhubungan dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Owusu-Ansah (2000) melakukan penelitian mengenai *Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Market: Empirical Evidence from the Zimbabwe Stock Exchange*. Owusu-Ansah menguji ukuran perusahaan, profitabilitas, *gearing*, *extraordinary and/ or contingent items*, bulan akhir tutup buku, kompleksitas operasi, dan usia perusahaan. Sampel yang digunakan berjumlah 47 perusahaan non-keuangan dari 64 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Zimbabwe pada 31 Desember 1994. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan yang memadai untuk menjelaskan perilaku pelaporan keuangan dari perusahaan.

Kristina (2005) melakukan penelitian tentang faktor- faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini diambil dari *50 most active stocks by trading frequency* di BEJ tahun 2000-2002 dengan jumlah sampel 48 emiten. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan, sedangkan *debt equity ratio*, konsentrasi kepemilikan pihak luar, ukuran perusahaan, kepemilikan manajer tidak signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Kadir (2011) meneliti seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2005 – 2006 dengan jumlah sampel 144 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, *ratio gearing*, pos-pos luar biasa, umur perusahaan tidak signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

Wirakusuma dan Cindrawati (2011) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktepatwaktuan publikasi laporan keuangan. Populasi yang digunakan adalah seluruh emiten yang *listing* di BEI dan tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Periode penelitian tahun 2007-2009 dengan jumlah sampel sebanyak 78 emiten. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas, solvabilitas, kandungan laba, dan jenis industri tidak mempengaruhi ketidaktepatwaktuan publikasi laporan keuangan. Sedangkan reputasi auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketidaktepatwaktuan publikasi laporan keuangan.

Penelitian Handayani dan Wirakusuma (2013) menggunakan populasi sebanyak 464 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kriteria yang dijadikan sampel adalah perusahaan-perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan memiliki akhir tahun buku per 31 Desember, perusahaan yang tidak melakukan pergantian akuntan publik selama periode penelitian serta menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan setelah tanggal 31 Maret. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, selama periode tahun 2009- 2011 sampel

yang digunakan adalah sebanyak 81 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidaktepatwaktuan publikasi laporan keuangan sementara variabel solvabilitas terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap ketidaktepatwaktuan publikasi laporan keuangan.

Penelitian Pradana dan Wirakusuma (2013) bertujuan untuk menguji apakah kompleksitas operasi, umur perusahaan, kepemilikan publik berpengaruh terhadap keterlambatan publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan berjumlah 110 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan selama periode 2009-2011. Dari empat faktor yang diteliti, hanya opini akuntan publik yang terbukti berpengaruh terhadap keterlambatan publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan. Sedangkan sisanya memberikan hasil yang sebaliknya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan (*compliance*) dapat diartikan mengikuti atau menuruti hukum yang telah diatur (wikipedia.org). Tyler (dalam Saleh, 2004) menyebutkan bahwa terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum. Dua perspektif tersebut yaitu normatif dan

instrumental. Perspektif normatif menekankan pada moralitas sedangkan perspektif instrumental menekankan pada kepentingan pribadi serta tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku.

Pada bidang ekonomi, Harahap (2011:608) menyebutkan bahwa kepatuhan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam penciptaan nilai perusahaan. Hal tersebut berarti setiap perusahaan harus mematuhi seluruh aturan yang berlaku seperti kode etik perusahaan, aturan pemerintah, UU, dan lain sebagainya. Teori kepatuhan akan mendorong individu untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor X.K.2 akan mendorong pula seluruh perusahaan publik untuk mempublikasikan dan menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu sebagai implementasi dari teori kepatuhan.

2.2.2 Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal dan prinsipal menutup kontrak untuk memberi imbalan pada agen. Prinsipal mengikat suatu pihak (agen) untuk mengelola aset yang dimilikinya dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan pihak prinsipal.

Teori keagenan juga memungkinkan terjadinya asimetri informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai prinsipal. Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang dibandingkan dengan informasi yang diperoleh prinsipal, sehingga dalam kaitannya dengan hal tersebut, laporan keuangan yang disampaikan dengan segera atau tepat waktu akan dapat mengurangi asimetri informasi tersebut (Kim dan Verrechia dalam Kadir, 2008).

2.2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu media untuk menggambarkan posisi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari operasi perusahaan. Menurut Budi Raharja (2001) laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh manajemen atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya dari pemilik (deviden), pemerintah (kantor pajak), kreditur (bank dan lembaga keuangan lainnya) dan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat umum. Laporan-laporan ini memberikan dasar untuk memberikan kompensasi kepada para partisipan atau pemegang andil (Weston dan Copeland 1997).

Standar Akuntansi Keuangan atau SAK (2007) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan bagian proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi perubahan modal, catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Dalam SAK (2007) juga menjelaskan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial,

karyawan dan pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan lembaganya, serta masyarakat yang menggunakan untuk kebutuhan informasi yang berbeda. Menurut SFAC No.1 Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berharga bagi investor dan kreditor serta pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit secara rasional (Ahmad Riahi Belkaoui,1997). Sedangkan menurut SAK (2007) Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan serta perubahan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Terdapat empat ciri khusus yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi para pemakai yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan (SAK,2007).

Pada umumnya laporan keuangan dibuat dalam periode satu tahun buku. Apabila periode pembukuan dimulai tanggal 1 Januari berakhir tanggal 31 Desember maka laporan keuangan dibuat tanggal 31 Desember. Bila periode pembukuan dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret maka laporan keuangan dibuat tanggal 31 Maret (sesuai dengan tahun anggaran pemerintah) (Budi Raharjo,2001,h.49). Walaupun periode akuntansi yang digunakan adalah tahunan, manajemen masih dapat menyusun laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek misalnya bulanan, triwulan, atau kuartal (Baridwan,1992,h.18). Pelaporan publikasi laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia menurut undang-undang diwajibkan secara berkala kepada Bapepam baik laporan tahunan yang diaudit dan laporan keuangan yang tidak diaudit. Adapun penyampaian

laporan keuangan triwulan adalah bersifat sukarela. Laporan keuangan yang harus disampaikan kepada Bapepam sesuai dengan SAK yang terdiri dari: (1) neraca, (2) laporan laba rugi, (3) laporan saldo laba, (4) laporan arus kas, (5) catatan laporan keuangan, (6) laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, seperti: laporan komitmen dan kontinjensi perubahan untuk emiten dan perusahaan publik yang bergerak di bidang perbankan.

2.2.4 Pelaporan Keuangan di Indonesia

Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam. Ketentuan yang lebih spesifik tentang pelaporan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang Laporan Tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2006, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik, diberlakukanlah Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada

akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Namun sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 dinyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan.

2.2.5 Ketidaktepatwaktuan

Gregory dan Van Horn (dalam Owusu dan Ansah, 2000:278) menyatakan kualitas ketepatanwaktuan (*timeliness*) ditunjukkan dengan dengan dua hal yakni, tersedia pada waktu yang tepat atau dijadwalkan dengan baik. Ketepatanwaktuan informasi mengandung pengertian bahwa informasi sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan (Suwardjono, 2002:11). Berkaitan dengan pengertian tersebut, ketepatanwaktuan laporan keuangan tahunan tersedia di publik sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan.

Dari konsep ketepatanwaktuan, maka poin penting yang menjadi masalah adalah apabila tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ketidaktepatwaktuan publikasi laporan keuangan adalah keterlambatan dalam menerbitkan laporan keuangan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun media cetak lainnya (Masodah dan Mustikaningrum, 2009). Tidak tepat waktu dapat dikonsepsikan sebagai waktu antara ketersediaan informasi yang didistribusikan oleh pelapor informasi pada saat tertentu dengan distribusi informasi yang seharusnya sudah diterima oleh pemakai informasi pada waktu yang telah ditetapkan (Syafudin, 2004:760).

2.2.6 Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Mamduh, 2003: 83). Rasio ini dapat diukur dengan menggunakan profit margin, *Return on Total Asset (ROA)*, atau *Return on Equity (ROE)*.

Profit margin dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan. Rasio ini digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Menurut Mamduh (2003), *profit margin* yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu, sedangkan *profit margin* yang rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut.

Return on Total Asset (ROA) dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan total aktiva (Mamduh, 2003: 85). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat aset tertentu. Menurut Munawir (2004: 89), besarnya ROA dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu *turnover* dari *operating assets* serta *profit margin*. Oleh karena itu, ROA dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam *profit margin* atau *assets turnover*, baik masing-masing atau keduanya.

2.2.7 Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan sebagai alat ukur sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangannya, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang (Munawir, 2004: 32). Suatu perusahaan dikatakan solvabel apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya. Rasio ini dapat diukur dengan menggunakan rasio total hutang terhadap total aset, *times interest earned*, atau *fixed charges coverage*.

Rasio total hutang terhadap total aset umumnya disebut sebagai rasio hutang yang dihitung dengan cara membagi total hutang dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur persentase penggunaan dana yang berasal dari kreditor. Kreditor dan pemegang saham, selain berminat terhadap kondisi keuangan jangka pendek perusahaan, juga memperhatikan kondisi keuangan jangka panjang karena posisi keuangan jangka pendek yang baik tidak selalu paralel dengan posisi keuangan jangka panjang. Kondisi keuangan jangka pendek yang baik tidak menjamin adanya kondisi keuangan yang baik pula untuk jangka

panjang. Menurut Husnan (1988: 207), para kreditor lebih menyukai rasio hutang yang rendah karena semakin rendah rasio hutang, maka semakin besar perlindungan yang diperoleh para kreditor dalam keadaan likuidasi.

Times interest earned dihitung dengan cara membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga (Mamduh, 2003: 82). Rasio ini mengukur seberapa besar laba dapat berkurang agar perusahaan bisa membayar beban bunga tahunan. Menurut Husnan (1988: 208), ketidakmampuan perusahaan dalam membayar beban bunga tahunan dapat membawa kesulitan keuangan yang serius karena pemberi pinjaman bisa mempertimbangkan kemungkinan kebangkrutan perusahaan.

Fixed charges coverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban tetap dengan memperhitungkan biaya sewa (Mamduh, 2003: 83). Rasio ini mirip dengan rasio *times interest earned*, tetapi lebih lengkap karena mempertimbangkan biaya sewa yang merupakan kontrak jangka panjang, artinya perusahaan mempunyai kewajiban finansial yang tetap, yaitu membayar sewa selama periode kontraknya (Husnan, 1988: 209). Apabila rasio *fixed charges coverage* lebih rendah dari rata-rata industri, maka perusahaan akan kesulitan dalam memperoleh kredit baru.

2.2.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dipengaruhi oleh kompleksitas operasional, variabilitas dan intensitas transaksi perusahaan yang tentunya akan berpengaruh terhadap kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan kepada publik (Rachmawati, 2008). Besar kecilnya ukuran perusahaan juga dapat didasarkan pada total nilai

aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Hilmi dan Ali, 2008).

Dyer dan McHugh (1975), Givoly dan Palmon (1982), dan Owusu-Ansah (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat, maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik.

Ukuran perusahaan yang besar memiliki alokasi dana yang lebih besar untuk membayar biaya audit (audit fees), hal ini menyebabkan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki Timeliness yang lebih pendek bila dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih kecil (Rachmawati, 2008).

2.2.9 Pergantian Auditor

Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, karenanya informasi yang ada didalam laporan keuangan haruslah wajar dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pihak – pihak yang berkepentingan tersebut. Untuk memperoleh kewajaran atas informasi di laporan

keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan maka dibutuhkanlah akuntan publik. Akuntan publik adalah pihak independen yang dianggap mampu menjembatani benturan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan (Wijayanti dan Januari, 2011).

Untuk mempertahankan independensi auditor dan keandalan suatu laporan keuangan maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan rotasi audit. Rotasi audit merupakan peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Di Indonesia sendiri peraturan mengenai rotasi audit sudah diatur sejak tahun 2002 yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 dan KMK Nomor 359/KMK/.06/2003 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) selama maksimal 6 tahun berturut – turut dan auditor selama 3 tahun berturut – turut. Hal ini menyebabkan perusahaan mau tidak mau memiliki keharusan untuk melakukan pergantian auditor dan KAP mereka setelah jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan tersebut.

Selain adanya faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk berganti auditor dan KAP, terdapat pula faktor-faktor internal perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk berganti auditor. Penelitian Chow dan Rice (1982) menyatakan bahwa banyak perusahaan yang melakukan pergantian auditor lebih disebabkan karena menerima opini “qualified” dari auditor sebelumnya. Kemudian terdapat pula penelitian dari

Krishnan (1994) yang meneliti mengenai pergantian auditor dan konservatisme, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemungkinan pergantian auditor lebih disebabkan bukan karena opini “qualified” semata tetapi juga karena penilaian konservatif yang diberikan oleh auditor.

2.2.10 Kandungan Laba

Laba merupakan salah satu informasi potensial yang terkandung di dalam laporan keuangan dan yang sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Laba merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Informasi tentang laba mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang ditetapkan (Parawiyati, 1996). Informasi laba merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, dan menaksir risiko investasi atau meminjamkan dana (Kirschenheiter dan Melumad 2002). Karakteristik laba yang terkandung dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi kecepatan penyampaian laporan keuangan ke publik. Apabila kandungan laba tersebut berkarakter baik (*good news*) maka pengumumannya akan dipercepat. Sebaliknya, bila berkarakter buruk (*bad news*), maka pengumumannya akan cenderung ditunda (Givoly dan Palmon, 1982).

2.2.12 Jenis Industri

Menurut Sadli (2002:9) industri adalah merupakan kumpulan dari beberapa perusahaan-perusahaan atau firma yang mengusahakan atau memproduksi suatu

barang yang serupa. Penggolongan jenis industri yang sering dilakukan dalam berbagai penelitian adalah antara perusahaan finansial dan non finansial. Ashton, et al., dan Curtis (dalam Utami, 2006), mengungkapkan bahwa perusahaan sektor financial mempunyai audit delay lebih pendek daripada perusahaan industri lain. Hal ini disebabkan karena perusahaan financial tidak mempunyai saldo persediaan sehingga audit yang diperlukan tidak memerlukan waktu yang cukup lama.

2.3 Perumusan Hipotesa

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketidaktepatwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penyerahan total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2001:122). Kemampuan perusahaan menghasilkan laba berhubungan dengan penyajian informasi tersebut kepada publik, seperti yang dibuktikan oleh Carslaw dan Kaplan (dalam Wirakusuma, 2004:57) bahwa perusahaan yang mengalami rugi operasional telah meminta auditornya untuk menjadwalkan pengauditan lebih lambat daripada biasanya.

Dyer dan McHugh (1975:90) menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh laba semakin tinggi akan mempublikasikan laporan keuangannya tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian. Semakin tinggi laba yang diperoleh oleh perusahaan, maka semakin rendah tingkat ketidaktepatwaktuan publikasi laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H1: Profitabilitas berpengaruh signifikan pada tingkat ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan.

2.3.2 Pengaruh Solvabilitas terhadap Ketidaktepatwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan

Solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utangnya, baik dalam keadaan perusahaan masih berjalan maupun dalam keadaan dilikuidasi. Solvabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan membandingkan jumlah utang dengan jumlah aktiva.

Kaplan (1991) dalam Elisabeth P. (2007) menemukan hubungan yang tidak signifikan antara *rasio total debt to total assets* dengan *audit delay* untuk perusahaan sampelnya pada tahun 1987, namun signifikan untuk perusahaan sampelnya pada tahun 1988. Proses pengauditan utang relatif memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan pengauditan ekuitas, khususnya jumlah debt holder-nya lebih banyak.

Sementara menurut Abdullah (dalam Wirakusuma, 2004) meningkatnya jumlah utang yang digunakan perusahaan akan memaksa perusahaan untuk menyediakan laporan keuangan tahunan auditan secara lebih cepat. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut.

H2: Solvabilitas berpengaruh signifikan pada tingkat ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ketidaktepatwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan

Nuryaman (2009) menyatakan bahwa perusahaan berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan lebih luas sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi tuntutan lebih besar dari para stakeholder untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih tepat waktu. Scwartz dan Soo (1996:84) menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan.

Carslaw dan Kaplan (1991) mengemukakan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki sistem pengendalian intern yang kuat dengan konsekuensi auditor menghabiskan lebih sedikit waktu dalam melakukan pengujian ketaatan dan pengujian substantif. Di samping itu, Dyer dan Mchugh (Wirakusuma, 2004:56) menemukan bahwa manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi penundaan audit (audit delay) dan penundaan publikasi laporan keuangan senantiasa diawasi secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan, dan regulator. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dibentuk adalah :

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh pada tingkat ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan.

2.3.4 Pengaruh Pergantian Auditor terhadap Ketidaktepatwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan

Bangun (2012) menemukan bahwa pergantian auditor tidak akan mengganggu kegiatan publikasi laporan keuangan. Pergantian auditor, ketika perusahaan menggunakan auditor yang berbeda dari tahun sebelumnya, ada kemungkinan mempengaruhi keterlambatan publikasi laporan keuangan.

Bagi auditor baru yang ditunjuk oleh manajer yang baru tentu memerlukan waktu tambahan untuk memahami operasional dan bisnis perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pergantian auditor mempengaruhi ketepatan publikasi laporan keuangan (Panjaitan, 2010). Pelu dan Kuswanto (2012) menemukan bahwa pergantian auditor berpengaruh signifikan terhadap ketepatan publikasi laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dibentuk adalah :

H4: Pergantian auditor berpengaruh pada tingkat ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan

2.3.5 Pengaruh Kandungan Laba terhadap Ketidaktepatwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan

Sebagai informasi yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi, karakteristik laba yang terkandung dalam laporan keuangan juga dapat mempengaruhi kecepatan penyampaian laporan keuangan ke publik. Apabila kandungan laba tersebut berkarakter baik (*good news*) maka pengumumannya akan dipercepat. Sebaliknya, bila berkarakter buruk (*bad news*), maka pengumumannya akan cenderung ditunda (Givoly dan Palmon, 1982). Patell dan Wolfson (1982) juga menemukan bahwa peningkatan laba dan atau dividen akan menyebabkan

perusahaan mengemukakan laporan keuangan lebih awal karena hal ini dianggap sebagai *good news*. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami penurunan laba/dividen atau bahkan tetap dari periode sebelumnya, maka kecenderungan perusahaan menunda penyajian laporan keuangan ke publik karena hal ini dianggap sebagai *bad news* yang dapat merugikan. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut.

H5: Kandungan laba berpengaruh pada tingkat ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan.

2.3.6 Pengaruh Jenis Industri terhadap Ketidaktepatwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan.

Karakteristik industri yang berbeda-beda dapat menyebabkan perbedaan rentang waktu dalam proses pelaksanaan audit maupun dalam publikasi pelaporan keuangan ke publik. Penggolongan jenis industri yang sering dilakukan dalam berbagai penelitian adalah antara perusahaan finansial dan non finansial.

Imam Subekti dan Novi Wulandari (2004) (dalam Supriyati dan Rolinda (2007)) menemukan bahwa jenis perusahaan finansial mengalami *audit delay* lebih pendek dibandingkan dengan industri lain. Hal ini terjadi karena perusahaan finansial memiliki sebagian besar asetnya berbentuk nilai moneter sehingga lebih mudah diukur bila dibandingkan dengan aset yang dimiliki industri lain yang didominasi dalam bentuk fisik. Dengan demikian perumusan hipotesisnya dinyatakan sebagai berikut :

H6: Jenis industri berpengaruh pada tingkat ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan tujuh variabel, yaitu enam variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, pergantian auditor, kandungan laba, dan jenis industri sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan.

Gambar 2.1

